

**PARTISIPASI PRESSURE GROUP DALAM PROSES PENETAPAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK KELAS III BANDUNG**

Oleh : Ichwan Muis
Universitas Cokroaminoto Palopo
Ichwanmuis@uncp.ac.id / Ichwanmuis@yahoo.com

Abstract

Disaster management in the Class III Bandung Penitentiary has not received much attention from the government or other related parties. This can be seen from the absence of a disaster management management policy at the Bandung Class III Child Correctional Institution. Advocacy efforts for policy formulation have been carried out to respond to existing issues. But the results of the policy formulation only arrived at the consultation stage where the results had produced a draft disaster management management policy. This is not enough in order to solve the existing disaster problems. So, the next researcher involves pressure group participation in the process of determining disaster management policy. This study aims to pilot ideas into the process of determining disaster management management policies. Pressure group involvement is an effort to pressure the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Java Province. The research method used qualitative research methods with action research types. Sources of data obtained are from the pressure group and the target pressure. Data collection techniques use interview techniques, documentation studies, participatory observations, and focus group discussions. Checking the validity of the data is done through credibility test, transferability test, dependability test, and confirmability test. Pressure group participation is chosen, because the policy formulation process can also be said to be a political process. Many actors are involved in the policy process, one of which is the pressure group. The actors in the policy formulation process can influence each other. Therefore the pressure group is expected to be able to provide pressure on the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Java Province through disaster management campaign activities at the Class III Bandung Penitentiary. The pressure group technique used in conducting pressure is lobbying and demonstration techniques. The success of the implementation of the activities can be seen from the birth of several policies related to disaster management in the Class III Bandung Penitentiary. The policy is the Decree Number: W.11.PAS.PAS.26.UM.01.01.408 of 2015 concerning the Class III Bandung Penitentiary Disaster Management Team and Letter Number: W11.PAS.PAS.26-PK.01.08 .03-387 / 2015 concerning Application for a Memorandum of Understanding with the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of West Java Province.

Keywords: social policy, disaster management, child correctional institutions, pressure groups.

Abstrak

Penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung belum begitu banyak mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun dari pihak terkait lainnya. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung. Upaya advokasi perumusan kebijakan telah dilakukan untuk merespon isu permasalahan yang ada. Namun hasil perumusan kebijakan hanya sampai pada tahap konsultasi dimana hasilnya telah melahirkan *draft* kebijakan manajemen penanggulangan bencana. Hal tersebut tidaklah cukup dalam rangka menyelesaikan permasalahan kebencanaan yang ada. Sehingga selanjutnya peneliti melibatkan partisipasi *pressure group* dalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengujicobakan ide kedalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana. Pelibatan *pressure group* merupakan suatu upaya untuk melakukan *pressure* terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *action research*. Sumber data yang diperoleh yakni dari *pressure group* dan *pressure target*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, observasi partisipatif, dan *focus group discussion*. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan melalui uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Partisipasi *pressure group* dipilih, karena proses perumusan kebijakan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses politik. Banyak aktor yang terlibat dalam proses kebijakan salah satunya yakni *pressure group*. Aktor-aktor tersebut di dalam proses perumusan kebijakan dapat mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu *pressure group* diharapkan dapat memberikan *pressure* terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan kampanye penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung. Adapun teknik *pressure group* yang digunakan dalam melakukan *pressure* yakni teknik *lobby* dan *demonstration*. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari lahirnya beberapa kebijakan terkait manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung. Adapun kebijakan tersebut yakni Surat Keputusan Nomor : W.11.PAS.PAS.26.UM.01.01.408 Tahun 2015 Tentang Tim Penanggulangan Bencana Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung dan Surat Nomor : W11.PAS.PAS.26-PK.01.08.03-387/2015 tentang Permohonan Kerja Sama (*Memorandum of Understanding*) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

Kata kunci : kebijakan sosial, manajemen penanggulangan bencana, lembaga permasarakatan anak, *pressure group*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara teoritik, birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum (Hardiansyah, 2011:19). Fungsi pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya, memberikan pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat. Fungsi pembangunan,

berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan unit organisasi yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu sektor pembangunan. Fungsi pokoknya adalah *development function* dan *adaptive function*. Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulasi), termasuk didalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan (*regulation function*)

Keterkaitan satu sama lain fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan. Perundang-undangan atau kebijakan merupakan hal yang mendasari proses pelayanan terhadap masyarakat. Kebijakan menurut para ahli seperti yang dikemukakan oleh Dye (2008:7) mengemukakan bahwa, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sementara menurut Carl Friedrich (2008:7) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan pemerintah merupakan poin utama dalam pelayanan publik. Pelayanan publik adalah hal yang sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat karena kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan.

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun penyelenggara tersebut yakni, penyelenggara negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/atau dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti mengarahkan penelitian ini terhadap salah satu bentuk pelayanan berupa pelayanan dalam penanggulangan bencana. Di Indonesia pelayanan penanggulangan bencana diatur didalam UU No 24 Tahun 2007. Dalam UU

tersebut dijelaskan bahwa kelembagaan yang mempunyai peran utama dalam penanggulangan bencana yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagaimana dimaksud pada pasal 11 UU No 24 Tahun 2007 berperan sebagai; pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaan pelayanannya, BNPB dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD ini merupakan pelaksana penanggulangan bencana pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini sebagai suatu bentuk tanggung jawab Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia baik kehidupan maupun penghidupan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat UUD 1945 memberikan kita pemahaman bahwa negara menjamin perlindungan seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bagi masyarakat umum di Indonesia sudah begitu banyak mendapat perhatian namun bagi sebagian masyarakat yang termasuk didalam kelompok wargabinaan belum mendapat banyak pelayanan dalam penanggulangan bencana.

Dari hasil praktikum, peneliti sangat kesulitan untuk mendapatkan berbagai kebijakan terkait penanggulangan bencana di Lembaga Perumahan maupun Rumah Tahanan. Praktikum tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan (11 Agustus – 14 November 2014) dilembaga perumahan Anak Kelas III Bandung.

Dalam proses pelaksanaan praktikum tersebut peneliti, melakukan analisis terhadap kebijakan penanggulangan bencana di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Proses tersebut mengacu kepada analisis menurut Dunn. Analisis kebijakan menurut Dunn (Riant Nugroho, 2014:265) adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditunjukkan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Adapun proses perumusan kebijakan tersebut terdiri dari; mengidentifikasi isu kebijakan, merumuskan agenda kebijakan, melakukan konsultasi, menetapkan keputusan, melakukan implementasi, dan evaluasi terhadap kebijakan.

Pada dasarnya *stakeholder* memahami pentingnya kebijakan penanggulangan bencana di lembaga permasyarakatan, namun dalam tahapan penetapan kebijakan *stakeholder* belum banyak memberikan kontribusi. Padahal setiap warga negara Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 berhak mendapat kepastian perlindungan termasuk dalam perlindungan menghadapi bencana. Oleh karena itu perlu adanya melibatkan aktor-aktor lain dalam rangka percepatan pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di lembaga permasyarakatan. Aktor-aktor ini diharapkan nantinya dapat memberikan pengaruh sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang mereka miliki. Pelibatan aktor-aktor ini (*pressure group*) menjadi fokus peneliti dalam proses penelitian dalam rangka menyempurnakan model proses perumusan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas III Bandung terutama dalam proses penetapan kebijakan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian terkait proses penetapan kebijakan penanggulangan bencana di lembaga permasyarakatan, maka rumusan masalah yang

dirancang oleh peneliti yakni “*Bagaimana partisipasi pressure group dalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas III Bandung.*” Dari pokok permasalahan tersebut, kemudian dirumuskan uraian dalam beberapa pertanyaan dalam sub-sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana *diagnosing* proses perumusan kebijakan penanggulangan bencana di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas III Bandung ?
2. Bagaimana partisipasi *pressure group* dalam :
 - a. *Planning Action*.
 - b. *Pressure Action*.
 - c. *Evaluation Action*.
3. Bagaimana penyempurnaan model dalam proses perumusan kebijakan penanggulangan bencana di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas III Bandung?

Tujuan Penelitian

1. Memahami *diagnosing* proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas III Bandung.
2. Mengetahui partisipasi *pressure group* dalam :
 - a. Melakukan *planning action* dalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas III Bandung.
 - b. Melakukan *pressure action* terhadap proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas III Bandung.
 - c. Melakukan *evaluation action* dan *improvement actions* dalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga

Permasyarakatan Anak Kelas III Bandung.

- d. Menyusun penyempurnaan model dalam proses perumusan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas III Bandung.

Manfaat Penelitian

1. Mendorong *target group* melalui pelibatan *pressure group* untuk menetapkan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas III Bandung.
2. Memberikan kepastian perlindungan bagi wargabinaan dari berbagai macam jenis bencana melalui usaha pelibatan *pressure group* dalam proses percepatan penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana.
3. Mengembangkan kemampuan praktik pekerja sosial dalam advokasi dan perencanaan sosial terhadap hak-hak anak dalam penanggulangan bencana, khususnya terhadap anak didik Permasyarakatan.

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dan cakupan dalam penelitian ini yakni Analisis kebijakan publik. Adapun kebijakan yang dimaksud yakni kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Peneliti melibatkan *pressure group* sebagai upaya untuk memberikan *pressure* terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat dalam rangka proses perumusan kebijakan. *Pressure group* dianggap sebagai salah satu aktor yang dapat memberikan pengaruh dalam proses tersebut. Partisipasi *pressure group* diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di

Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Adapun keterbatasan penelitian ini yakni, penelitian hanya bersifat lokal dan institusional. Karakteristik subjek yang berperan didalam penelitian ini sangat terbatas dan sangat dipengaruhi oleh objek penelitian sehingga hasil dari penelitian ini sulit untuk direplikasi. Namun bila terdapat kesamaan subjek dan objek tidak menutup kemungkinan dapat mereplikasi proses penelitian yang telah dilaksanakan terkait partisipasi *pressure group* dalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di lembaga Permasyarakatan atau rumah tahanan yang menjadi lokasi penelitian di masa yang akan datang.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Smith dan Larimer (2009) dalam (Solichin, 2014:11) meyakini “*there is not a field of public policy studies, there are field-plural-of public policy studies*” (ini bukan bidang studi kebijakan publik, ada bidang jamak dari studi kebijakan publik). Berdasarkan prespektif ini, baik konten maupun konteks kebijakan publik itu akan selalu dianggap sebagai bersifat plural, dan karena itu masalah-masalah kebijakan (*policy problems*) sebagai sebuah *academic enquiry* (permintaan akademik) tidak hanya menjadi minat perhatian ahli dari disiplin ilmu tertentu yang mempelajarinya atau mendekatinya secara monodisiplin.

Selain itu, Eystone (1971:18) dalam (Solichin, 2014:11) merumuskan dengan pendek kebijakan publik ialah “*the relationship of governmental unit to its environment*” (antar hubungan yang berlangsung diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Demikian pula definisi yang pernah dikemukakan oleh Wilson (2006:154) yang merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

“The actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)” (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)).

Pakar Inggris, W.I Jenkins (1978), merumuskan kebijakan publik sebagai :

“A set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

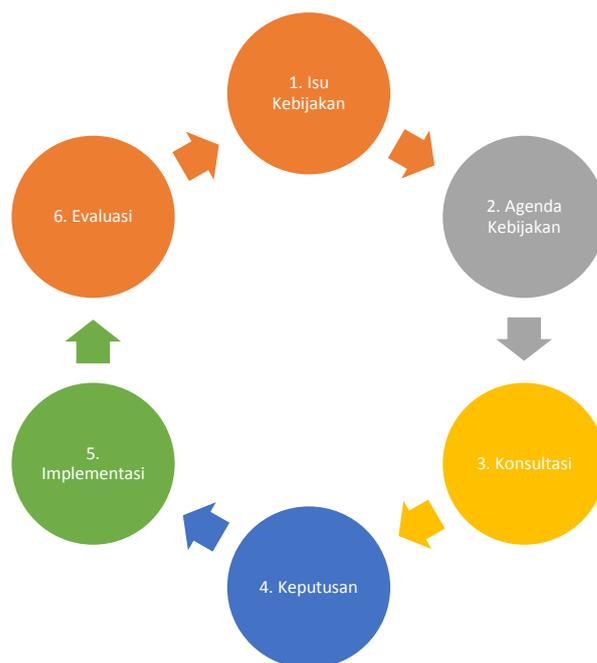
Pakar Prancis, Lemieux (1995:7), merumuskan kebijakan publik sebagai : *“The product of activities aimed at the resolution of publik problems in environment by political actors whose relationship are structured, The entire process evolves over time”* (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh faktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).

Dari berbagai definisi kebijakan publik diatas, dapat dipahami bahwa semua pembuatan kebijakan publik (*public policy making*) itu akan selalu melibatkan pemerintah, dengan cara tertentu. Gerston (2002), kiranya tidak keliru ketika ia dalam kaitan ini menegaskan bahwa *“all public policy making involves government in some way”* (semua pembuatan kebijakan publik melibatkan pemerintah dalam beberapa cara). Selain itu kita juga sebaiknya menyadari bahwa dalam realita politik aktor-aktor non pemerintah, yang dalam kepustakaan dikenal dengan istilah *civil society* berpotensi mempengaruhi saat-saat kritis selama berlangsungnya proses pemikiran, perkembangan, atau perumusan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan atau merespon suatu permasalahan publik.

Proses Perumusan/Pembuatan Kebijakan

Salah satu tugas pemerintah adalah sebagai perumus kebijakan publik. Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara sistematis, diperlukan sebuah proses yang sistematis pula (Suharto, 2011:23). Meskipun proses itu tidak selalu harus bersifat kaku, proses perumusan kebijakan memungkinkan sistem pemerintahan dalam merumuskan kebijakan menjadi teratur dan memiliki ritme yang jelas. Proses perumusan kebijakan sering pula disebut sebagai lingkaran kebijakan (*policy cycle*) (Bridgman dan Davis, 2004).

Sebagian besar tugas dalam proses perumusan kebijakan terletak pada para pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang dipimpin oleh seorang menteri disuatu departemen. Selain proses ini, melibatkan berbagai lembaga pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah juga biasanya terlibat terutama pada proses pengusulan isu dan agenda kebijakan serta pengevaluasiannya. Adapun enam (6) langkah dalam *policy cycle* yakni sebagai berikut :

Gambar Lingkaran Kebijakan (*Policy Cycle*)

Sumber : Suharto (2011:26)

Adapun penjelasan Gambar.3.2 Lingkaran Kebijakan (*policy cycle*) di atas yakni sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi isu kebijakan.

Isu-isu kebijakan ini pada hakikatnya merupakan permasalahan sosial yang aktual, mempengaruhi banyak orang, dan mendesak untuk dipecahkan.

b. Merumuskan agenda kebijakan.

Agenda kebijakan pada intinya merupakan sebuah masalah sosial yang paling memungkinkan direspon oleh kebijakan. Agenda kebijakan juga dapat dianalogikan dengan sebuah “topik diskusi” atau “agenda rapat” yang dibahas dalam sebuah

pertemuan besar para pejabat pemerintah dengan pihak-pihak terkait.

c. Melakukan konsultasi.

Arsitektur pemerintahan cenderung bersifat multi-ragam, melibatkan banyak lembaga dan sektor kehidupan. Karenanya, untuk menghindari tumpang tindih kepentingan dan memperoleh dukungan yang luas dari publik setiap agenda kebijakan perlu didiskusikan dengan berbagai lembaga dan pihak. Inilah saatnya melakukan konsultasi. Melalui konsultasi, ide-ide dapat diuji dan proposal kebijakan disempurnakan. Adapun instrumen konsultasi sebagai berikut :

Tabel Instrumen Konsultasi

Sosialisasi	Pertemuan	Kerjasama	Delegasi
<ul style="list-style-type: none"> • Survey • Penelitian Kelompok terfokus • Kampanye publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontak dan <i>lobby</i> dengan <i>stakeholder</i> kunci • Seminar • <i>Public Hearing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan penasihat • Penetapan <i>MoU</i> (<i>Memorandum of Under-standing</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Kebijakan • Organisasi non pemerintah • Komunitas.

Sumber : Suharto (2011:34)

d. Menetapkan keputusan.

Setelah isu kebijakan teridentifikasi, agenda kebijakan dirumuskan, dan konsultasi dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menetapkan alternatif kebijakan apa yang diputuskan. Jika kebijakan diwujudkan dalam bentuk program pelayanan sosial, tahap penetapan keputusan kebijakan melibatkan pembuatan pertimbangan oleh kabinet. Jika kebijakan berbentuk peraturan dan perundang-undangan, maka pembuatan keputusan melibatkan pihak eksekutif dan legislatif.

e. Implementasi.

Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat di implementasikan. Apabila sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak tahapan implementasi. Tahap ini melibatkan serangkaian kegiatan meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang diambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang akan dievaluasi.

f. Evaluasi.

Perumusan kebijakan pada hakikatnya merupakan proses terus menerus yang tiada henti. Karenanya, tidak mengherankan jika proses perumusan kebijakan sering disebut sebagai lingkaran kebijakan yang berputar terus-menerus. Secara formal, evaluasi merupakan tahapan “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan. Namun demikian dari evaluasi ini dihasilkan masukan-masukan guna penyempurnaan kebijakan atau perumusan kebijakan selanjutnya. Dengan begitu proses formulasi kebijakan menjadi mirip roda atau spiral yang berputar tiada akhir.

Pressure Group (Kelompok Penekan)**Definisi *pressure group* (kelompok penekan)**

Menurut Remi Anifowose (1999) *pressure group* adalah :

A pressure group is an organised social interest group formed solely to pursue its objectives/interest and influence government policies. The main aim or objective of any social interest group is not to take over state power but to influence government machinery to its own advantage (kelompok penekan merupakan kelompok kepentingan sosial yang terorganisasi yang dibentuk semata-mata untuk mengejar tujuan/kepentingan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tujuan atau sasaran dari kelompok kepentingan ini adalah tidak untuk mengambil alih kekuasaan, namun hanya untuk kemajuan mereka dengan mempengaruhi mesin pemerintahan itu sendiri).

Selanjutnya Akinbade (2008:210) menjelaskan definisi *pressure group* sebagai berikut :

Pressure groups as “an association of individuals whose main objective is to influence government in a manner favorable to the interest of its members. Unlike political parties, a pressure group has not interest in becoming the government. Rather, pressure groups are organised groups seeking to achieve defined goals” (kelompok penekan sebagai “sebuah asosiasi individu yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara yang menguntungkan untuk kepentingan anggotanya. Tidak seperti partai politik, kelompok penekan belum tertarik untuk menjadi pemerintah. Sebaliknya, kelompok penekan adalah kelompok terorganisir berusaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan).

Oyelele, (1998:61) juga memberikan penjelasan tentang *pressure group* sebagai berikut :

“exerts pressure on those who have responsibility for making decisions on behalf of the community. They struggle to influence decision makers and make them to adhere to their objectives. “In general, pressure groups come into being to enhance or protect the interest of their members or groups” (“tekanannya pada mereka yang memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan atas nama masyarakat. Mereka berjuang untuk mempengaruhi pengambil keputusan dan membuat mereka untuk mematuhi tujuan mereka. Secara umum, kelompok penekan terwujud untuk meningkatkan atau melindungi kepentingan anggota atau kelompok mereka).

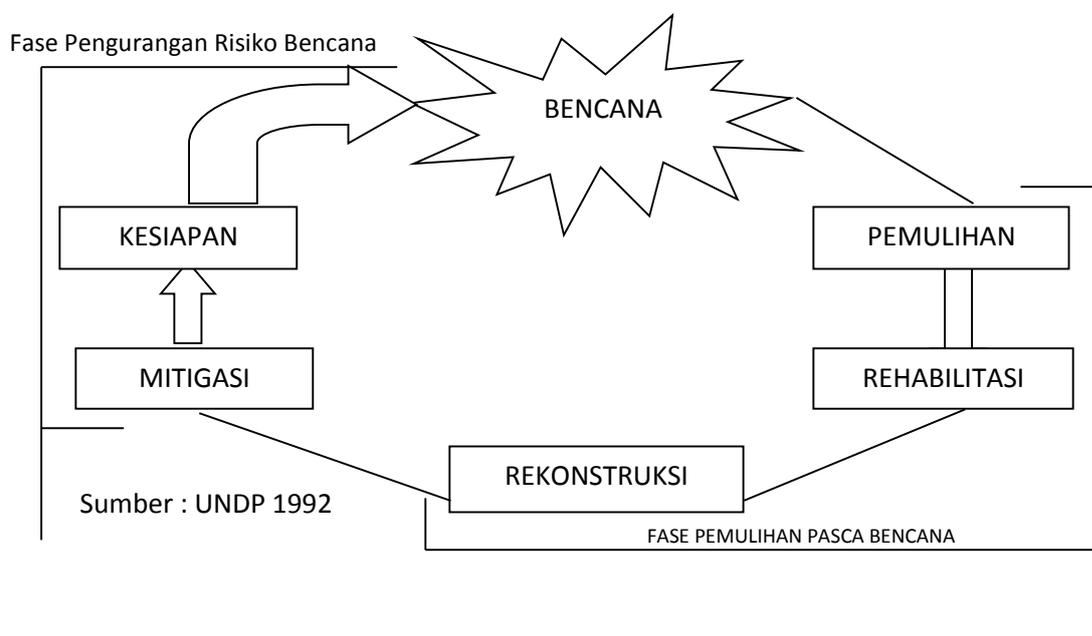
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kelompok penekan adalah untuk melindungi kepentingan anggota dan dari pengaruh pemerintah mereka. Adigun Agbaje berpendapat bahwa setiap kelompok orang yang menggunakan tekanan atau pengaruh terhadap para pengambil keputusan atau pemerintah dalam sistem demokrasi dapat dianggap sebagai kelompok penekan. Dia mengatakan bahwa “kelompok-kelompok

penekan dalam demokrasi adalah kelompok orang yang mencoba mendapatkan umpan balik dari pemerintah atau badan lain untuk memperhatikan hal-hal tertentu untuk melakukan sesuatu demi kemajuan kelompok tersebut. Anifose (1999) menegaskan bahwa kelompok penekan dapat juga dikatakan sebagai; kelompok kepentingan, kelompok *lobby*, atau kelompok protes.

Manajemen Bencana

Manajemen bencana adalah sekumpulan kebijakan dan keputusan-keputusan administratif dan aktivitas-aktivitas operasional yang berhubungan dengan berbagai tahapan dari semua tingkatan bencana. Satu definisi yang lebih luas dari bencana ciptaan manusia mengakui bahwa semua bencana disebabkan oleh ulah manusia karena manusia telah memilih, apapun alasannya, untuk berada dimana fenomena alam terjadi yang menyebabkan pengaruh-pengaruh yang merugikan manusia. Bencana dapat dipandang sebagai serangkaian fase-fase dari kontinum waktu. Memahami fase-fase berikut ini membantu untuk menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan bencana dan memberi konsep tentang aktivitas-aktivitas manajemen bencana yang memadai (Safii Nasution, 2005:10).

Gambar Fase Manajemen Bencana



Adapun penjelasan masing-masing fase diatas, yakni sebagai berikut :

Mitigasi adalah istilah gabungan yang digunakan untuk mencakup semua tindakan yang dilakukan sebelum munculnya satu bencana (tindakan-tindakan pra bencana) yang meliputi tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

Kesiapan terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk meminimalisir kerugian dan kerusakan kehidupan, mengorganisir pemindahan sementara orang-orang dan properti dari lokasi yang terancam dan memfasilitasi secara tepat dan penyelamatan yang efektif.

Fase Pemulihan adalah periode yang munculnya mengikuti satu bencana yang tiba-tiba (atau penemuan yang sudah terlambat dari situasi serangan yang lamban yang diabaikan) jika tindakan-tindakan pengecualian harus diambil untuk mencari dan menemukan mereka yang bertahan hidup dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar untuk tempat berteduh, air, makanan dan perawatan medis.

Rehabilitasi adalah tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang diambil setelah terjadi satu bencana dengan maksud untuk memulihkan kondisi-kondisi kehidupan sebelumnya dari satu masyarakat yang terkena bencana, sementara mendorong dan memfasilitasi penyesuaian-penyesuaian seperlunya terhadap perubahan-perubahan yang disebabkan oleh bencana.

Rekonstruksi adalah tindakan yang dilakukan untuk membangun kembali satu komunitas setelah satu periode rehabilitasi akibat dari satu bencana. Tindakan-tindakan mencakup pembangunan rumah yang permanen, pemulihan semua pelayanan-pelayanan secara penuh, dan memulai kembali secara tuntas dari keadaan sebelum bencana.

Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa, "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan wargabinaan dan anak didik Pemasyarakatan". Selain pengertian diatas, Supramono (Ibid, 113) memberikan definisi Lembaga Pemasyarakatan, sering disingkat dengan akronim LAPAS, sebenarnya merupakan tempat untuk terpidana atau wargabinaan menjalani hukuman pidananya bagi mereka yang dihukum penjara maupun kurungan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Pola Pembinaan Wargabinaan/Tahanan menegaskan bahwa, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina Wargabinaan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan dan Intensif Karya Wargabinaan menyatakan : Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemasyarakatan sebagai wadah kegiatan pembinaan terpidana menurut Sistem Pemasyarakatan. Secara Etimologi, Lembaga Pemasyarakatan berarti tempat orang menjalani hukuman pidana penjara.

Jadi dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan menurut sistem Pemasyarakatan yang ada. Didalam lembaga Pemasyarakatan terdapat wargabinaan, tahanan, dan anak didik. Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap

para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasarakatan (PP No.31, 1999).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiono:2005). Selain itu, Creswell (2003) juga mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai berikut :

A qualitative approach is one in which the inquirer often makes knowledge claims based primarily on constructivist perspectives (i.e the multiple meanings of individual experiences, meanings socially and historically constructed, with an intent of developing a theory or pattern) or advocacy/ participatory perspectives (i.e. political, issue-oriented, collaborative, or change oriented) or both.

Dari pengertian diatas, dipahami bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan prespektif konstruktif. Misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah, dimana tujuannya yakni untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu. Namun bisa juga berdasarkan prespektif partisipasi misalnya, orientasi

terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan dan bisa juga keduanya.

Pada penelitian di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung, peneliti mengamati dan memahami hal-hal terkait dengan isu masalah sosial berupa masalah kebencanaan. Masalah-masalah yang muncul disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang mitigasi bencana bagi anak didik dan pegawai lembaga Pemasarakatan atau faktor minimnya kebijakan yang mengatur manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan. Oleh karena itu peneliti bersama dengan *pressure group* akan berpartisipasi dalam mengidentifikasi dan merespon hal-hal yang mesti dilakukan untuk memberikan solusi yang dapat dilakukan dalam rangka pemecahan masalah yang mereka hadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (*action research*). Adapun definisi *action research* menurut Shani dan Pasmore dalam (David Coghlan dan Teresa Brannick, 2005:3) yakni :

Action research may be defined as an emergent inquiry process in which applied behavioural science knowledge is integrated with existing organizational knowledge and applied to solve real organizational problems. It is simultaneously concerned with bringing about change in organizations, in developing self-help competencies in organizational members and adding to scientific knowledge. Finally, it is an evolving process that is undertaken in spirit of collaboration and co-inquiry.

Definisi diatas, memberikan pemahaman bahwa penelitian tindakan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelidikan yang muncul dengan menerapkan pengetahuan ilmu perilaku terintegrasi terhadap pengetahuan organisasi yang ada untuk memecahkan masalah organisasi yang nyata. Hal ini sekaligus

menunjukkan keprihatinan sehingga perlu membawa suatu perubahan dan tambahan pengetahuan ilmiah bagi organisasi. Pada akhirnya pendekatan ini merupakan proses berkembang yang dilakukan dalam semangat kerja sama.

Selanjutnya, Eliot dalam Zuriah (2003:54) mengemukakan penelitian tindakan sebagai berikut :

Penelitian tindakan merupakan kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas kegiatan yang ada didalamnya, seluruh prosesnya meliputi; telaah, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan peman-tauan, dan dampak, menjalin hubungan yang diperlukan antara evaluasi dan perkembangan profesional.

Neuman (2000), memberikan pemahamannya tentang penelitian tindakan dengan penjelasan sebagai berikut :

Penelitian tindakan merupakan penelitian yang menekankan pada pengujicobaan suatu ide kedalam praktek dalam skala mikro, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan untuk memperbaiki situasi sosial yang ada. Penelitian tindakan

merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan kehidupan para partisipan. Asumsinya, bahwa penelitian ini mengembangkan pengetahuan dari pengalaman, dan bahwa setiap orang dapat memperbaiki kondisinya dengan cara menyadari dan mencoba untuk melakukan sesuatu terhadap kondisinya.

Dari beberapa pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa *action research* merupakan suatu penelitian yang melakukan upaya dengan memasukkan ide gagasan kedalam suatu sistem dimana melalui ide tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan maupun sistem sosial yang ada di masyarakat. Ide gagasan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni dengan melibatkan *pressure group* kedalam suatu sistem untuk memberikan pengaruh terhadap proses penetapan kebijakan yang dilakukan oleh *stakeholder* (birokrat) tentang kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasayarakatan Anak Kelas III Bandung. Adapun proses penelitian dengan menggunakan *action research*, dapat dilihat dari gambar berikut ini.



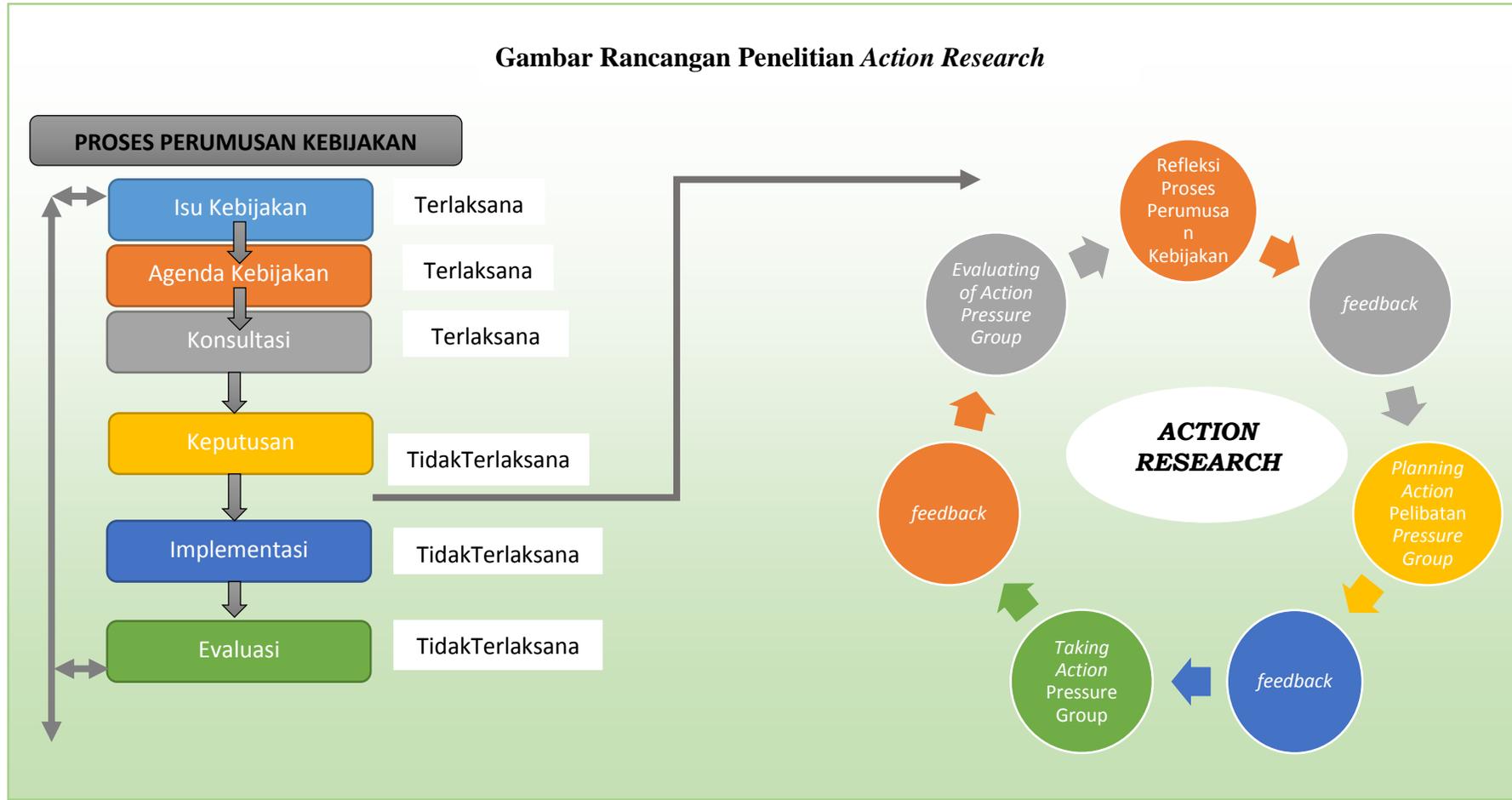
Gambar Proses *Action Research*.

Sumber : Modikasi model *The Action Researrch Cycle* (David Coghlan dan Teresa Brannick, 2005:22)

Pada proses penelitian, partisipasi *pressure group* maupun pihak lainnya menjadi sangat penting karena peneliti bersama dengan pihak-pihak tersebut belajar dan bekerja sama, sehingga pada penelitian ini terjadi *transfer of knowledge* antara peneliti dengan pihak-pihak tersebut. Fokus penelitian ini adalah menyelesaikan tahapan jangka panjang proses

perumusan kebijakan dan juga memperhatikan temuan-temuan yang diperoleh pada saat evaluasi proses awal, sehingga diperoleh tindakan (*action*) yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pihak-pihak terkait sesuai dengan masalah kebencanaan yang mereka alami saat ini. Kerangka kerja penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Rancangan Penelitian Action Research



Adapun penjelasan dari gambar di atas yakni sebagai berikut :

Dalam gambar 3.4 terdapat dua besaran proses yang menjadi acuan peneliti. Gambar disebelah kiri merupakan proses perumusan kebijakan yang sebagian telah dilakukan peneliti pada saat proses praktikum dan gambar disebelah kanan merupakan proses yang akan dilakukan peneliti pada saat proses penelitian.

Pada proses perumusan kebijakan (gambar sebelah kiri) terdapat 6 tahapan yang harus dilakukan didalam merumuskan suatu kebijakan. Pelaksanaan praktikum yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan kebijakan manajemen penanggulangan bencana telah dilakukan hingga tahap konsultasi. Namun tahapan konsultasi tidaklah cukup untuk merespon isu kebencanaan yang mengancam anak didik. Sehingga perlu adanya penetapan kebijakan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan untuk memberikan respon nyata terhadap isu tersebut. Oleh karena itu pada tahap penetapan diperlukan upaya-upaya untuk memberikan pengaruh dalam rangka percepatan pengambilan putusan. Peneliti melakukan *action research* dengan proses seperti pada gambar kanan di atas. Dengan

menggunakan *action research* maka dalam penelitian ini, peneliti memasukkan gagasan kedalam sistem berupa pelibatan *pressure group*. Pelibatan *pressure group* inilah yang nantinya menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka menyempurnakan model proses perumusan kebijakan (isu kebijakan, agenda kebijakan, konsultasi, keputusan, implementasi, dan evaluasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil *Diagnosing* Proses Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung.

Penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung merupakan tujuan yang telah direncanakan peneliti pada saat pelaksanaan praktikum setelah melalui proses yang panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti merancang sebuah proses dalam rangka menyusun tahapan demi tahapan dalam pelaksanaannya. Adapun proses dalam penetapan kebijakan digambarkan sebagai berikut :



Gambar Proses Penetapan Kebijakan Manajemen Penanggulangan Bencana Di LAPAS Anak Kelas III Bandung

Dari Gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa proses perencanaan hingga penetapan kebijakan dengan proses diatas dilakukan sepenuhnya oleh peneliti pada saat proses praktikum. Peneliti sebagai agen perubahan memainkan peran utama untuk menjalankan proses advokasi kebijakan penanggulangan bencana dengan melibatkan para pihak yang dianggap mampu mempengaruhi, merancang, hingga menetapkan suatu kebijakan.

Peneliti telah melakukan beberapa upaya dengan membuat kegiatan berupa penyusunan naskah kebijakan (*policy brief*), pembuatan *draft* kebijakan, melakukan *public hearing draft* kebijakan, dan penyempurnaan *draft* kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung dalam rangka proses perubahan.

Kebijakan yang menjadi target peneliti pada saat pelaksanaan praktikum yakni kebijakan yang berisi tentang manajemen penanggulangan bencana yang mengatur struktur organisasi serta tupoksi masing-masing satuan tugas dalam menjalankan fungsi dan tugas dalam penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung. Kebijakan ini menjadi rekomendasi dari proses intervensi yang telah dilakukan pada saat praktikum.

Dari hasil proses *diagnosing* yang telah dilakukan peneliti terhadap para pihak di atas, peneliti menyimpulkan *diagnosing* dari pelaksanaan intervensi praktikum sebagai berikut :

1. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat dan Pimpinan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung mengatakan bahwa pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung yakni Kanwil

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.

2. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung masih belum mendapat kepastian waktu. Hal ini dikarenakan pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat belum begitu menyadari pentingnya kebijakan tersebut.
3. Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat sangat menyadari pentingnya kebijakan tersebut.
4. Perlu adanya koordinasi lebih lanjut terkait tupoksi dari masing-masing instansi dalam pembuatan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung.
5. Adanya faktor non teknis di Divisi Pemasarakatan terkait perubahan struktur kepemimpinan menjadikan upaya-upaya yang telah dilakukan baik oleh peneliti maupun pihak-pihak terkait lainnya menjadi terhambat.
6. Kurangnya pelibatan partisipasi dari pihak-pihak lain untuk memperkuat asumsi peneliti menjadikan hasil intervensi praktikum kurang maksimal.

Pembahasan hasil *Planning action, taking action, dan evaluation action* Proses Penetapan Kebijakan Manajemen Penanggulangan Bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung

Proses perumusan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung terdiri dari beberapa tahapan yakni, menentukan isu kebijakan, menetapkan agenda kebijakan, melakukan konsultasi, menetapkan keputusan, pelaksanaan implementasi hingga evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Namun *diagnosing* yang dilakukan

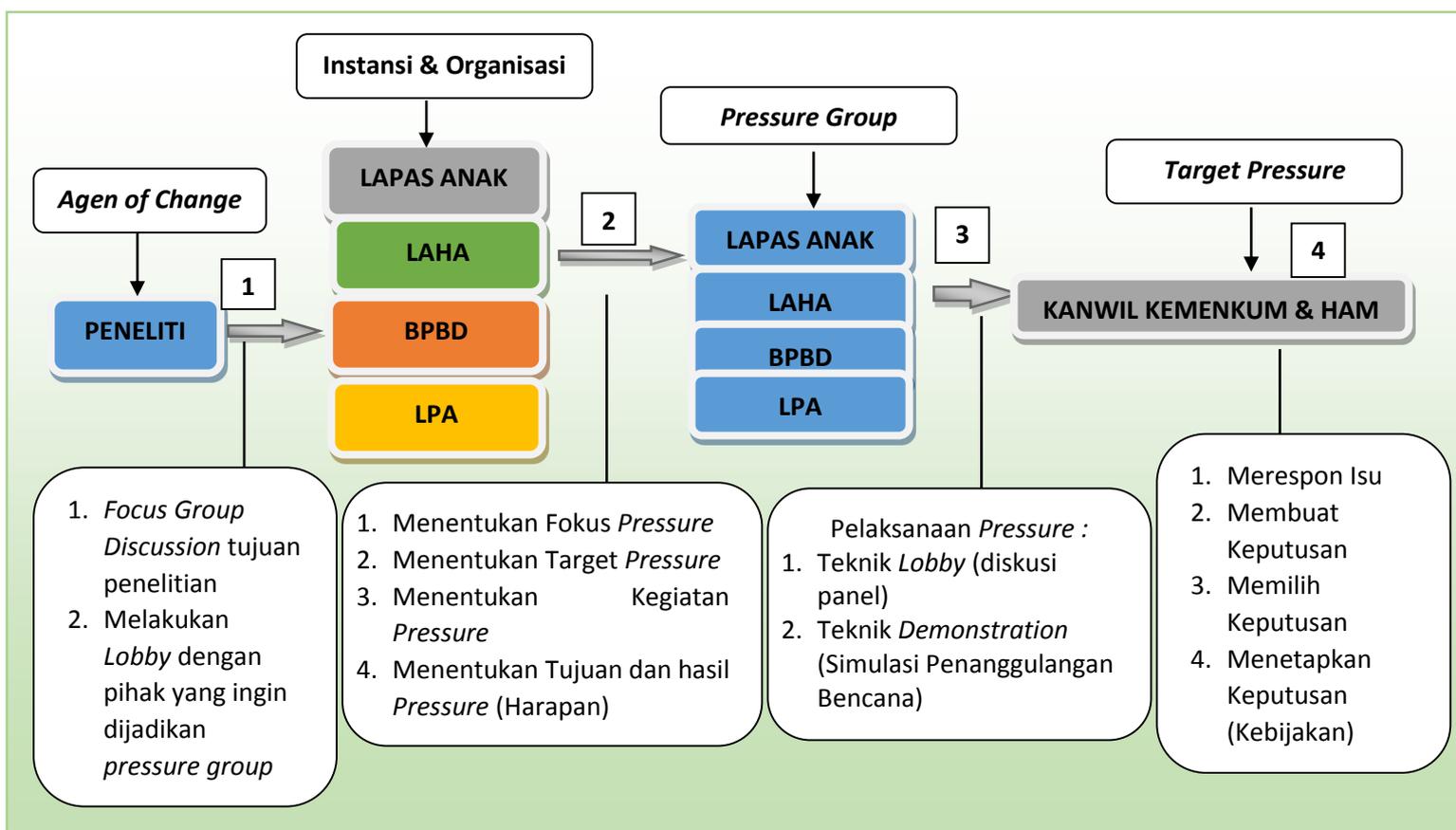
peneliti, dari proses intervensi pada saat praktikum diperoleh hasil bahwa tahapan perumusan kebijakan hanya sampai pada tahapan konsultasi.

Hasil tersebut tentunya masih sangat jauh dari harapan peneliti yakni dalam rangka melahirkan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung. Hal yang selanjutnya peneliti lakukan dalam pelaksanaan penelitian yakni melanjutkan hasil dari praktikum yang telah dicapai dengan melakukan *action research*. Seperti yang dipahami bahwa *action research* merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian suatu ide kedalam praktek dalam skala mikro, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan untuk memperbaiki situasi sosial yang ada, maka dalam penelitian ini pengujian ide

yang dilakukan yakni memasukkan *pressure group* untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan penetapan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan.

Proses perumusan kebijakan dapat juga dikatakan sebagai proses politik. Peneliti memperoleh banyak banyak aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan diantaranya, kalangan pemerintah (birokrasi), legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan, dan organisasi-organisasi komunitas. Aktor-aktor ini merupakan modal bagi peneliti untuk melaksanakan proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana. Adapun hasil penyempurnaan proses dalam penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung, digambarkan sebagai berikut:

Gambar Penyempurnaan Proses Dalam Penetapan Kebijakan Manajemen Penanggulangan Bencana Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung



Penyempurnaan proses dalam penetapan kebijakan diatas, dengan melibatkan *pressure group* untuk melakukan *pressure* terhadap Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat sangat efektif. Teknik-teknik yang dilakukan oleh *pressure group* berupa *lobby* (diskusi panel) dan *demonstration* (simulasi penanggulangan bencana) telah berhasil melahirkan beberapa kebijakan dan *rencana* kebijakan yang berbentuk *draft* yang telah masuk kedalam proses pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut yakni :

1. Surat Keputusan Nomor : W.11.PAS.PAS.26.UM.01.01.408 Tahun 2015 Tentang Tim Penanggulangan Bencana.
2. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Kebijakan ini lahir dari proses penetapan *draft* kebijakan yang telah dirancang dan disempurnakan secara bersama-sama pada saat praktikum. *Draft* tersebut berisi manajemen penanggulangan bencana yang mengatur tentang keorganisasian dan tupoksi masing-masing satuan tugas di dalam tim penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan.
3. *Draft Memorandum of Understanding* (MoU) antara Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat terkait dengan Penanggulangan Bencana di Lembaga

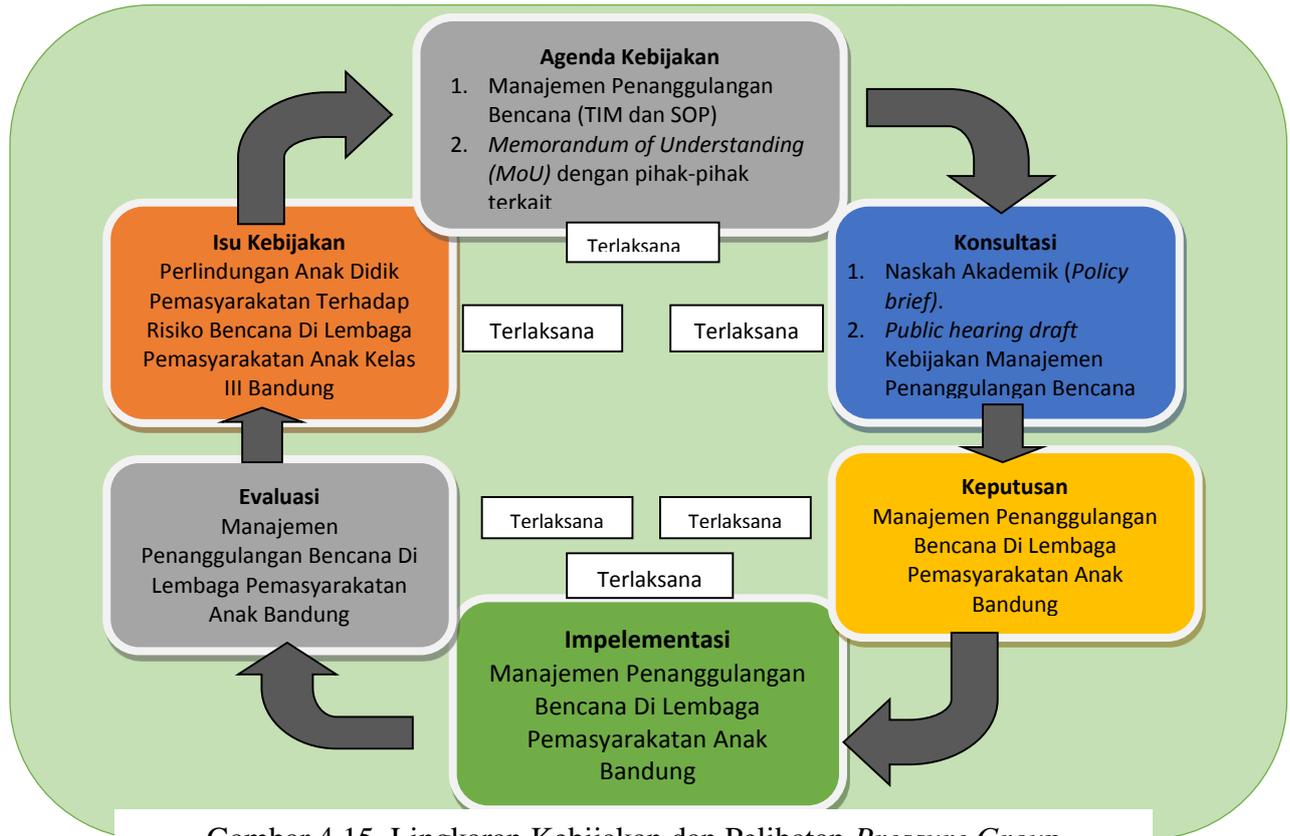
Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung. *Draft* tersebut dikirim bersamaan dengan surat pengantar permohonan kerjasama Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang dengan Nomor Surat : W11.PAS.PAS.26-PK.01.08.03-387/2015.

Kebijakan ini dilakukan dalam rangka melakukan koordinasi serta penguatan terhadap seluruh pihak dalam mengurangi risiko bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung.

Dari hasil yang telah dicapai dalam penelitian ini, maka peneliti berkesimpulan bahwa *pressure group* merupakan salah satu dari sekian banyak aktor yang dapat mempengaruhi proses kebijakan mulai dari isu kebijakan, menetapkan agenda kebijakan, melakukan konsultasi, menetapkan keputusan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Adapun hasil yang diperoleh dari pelibatan *pressure group* ini disimpulkan bahwa pengujian *pressure group* melalui pendekatan *action research*, mampu menyempurnakan proses perumusan kebijakan mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Hal ini terbukti dari adanya penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung setelah penelitian dilakukan.

Gambar dari lingkaran kebijakan dengan melibatkan *pressure group* yakni sebagai berikut :



Gambar.4.15. Lingkaran Kebijakan dan Pelibatan *Pressure Group*

KESIMPULAN

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penanganan kebencanaan dilingkungan masyarakat secara umum mungkin telah banyak mendapat perhatian oleh pemerintah dan berbagai pihak. Namun tidak bagi penanganan kebencanaan bagi anak didik dan petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung.

Belum adanya manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung melahirkan asumsi dari peneliti bahwa hal tersebut menjadikan tingkat kerentanan anak

didik dan petugas Pemasarakatan menjadi lebih tinggi. Sehingga untuk merespon fenomena tersebut peneliti telah melakukan suatu proses perumusan kebijakan sebagai suatu bentuk intervensi awal terhadap kebijakan penanggulangan bencana di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat.

Dari *diagnosing* yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap hasil intervensi praktikum diperoleh hasil bahwa tahapan perumusan telah melawati beberapa tahap yakni, menentukan isu masalah, menentukan agenda kebijakan dan melakukan konsultasi. Namun hasil tersebut menurut peneliti dianggap belum mampu memberikan solusi serta pemecahan permasalahan kebencanaan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung. Hasil tersebut juga memberikan kesimpulan bahwa kurangnya perhatian dan kesadaran dari pihak Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk melahirkan kebijakan dalam merespon kebijakan terkait pentingnya manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung secara khusus dan seluruh Unit Pelaksana Teknis secara umumnya.

Dari kondisi awal diatas, selanjutnya peneliti melakukan suatu *planning action* dengan melibatkan partisipasi *pressure group*. *Planning action* dilakukan oleh peneliti untuk merancang sebuah kegiatan dalam rangka melakukan *pressure* terhadap proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Adapun hasil dari *planning action* yakni disepakatinya kegiatan kampanye Penanggulangan bencana dengan tema “melalui kampanye penanggulangan bencana mari kita ciptakan petugas dan anak didik Pemasyarakatan yang tangguh bencana”.

Setelah melakukan *planning action* tahapan selanjutnya yang dilakukan peneliti beserta *pressure group* yakni melakukan *taking action*. Tahapan *taking action* ini dilakukan dengan dua teknik *pressure* yakni teknik *lobby* (dalam diskusi panel) dan teknik *demonstration* (dalam simulasi penanggulangan bencana). Adapun *pressure group* yang melakukan tahapan ini yakni :

1. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat.
4. Lembaga Advokasi Hak Anak Provinsi Jawa Barat.

Setelah kegiatan dilaksanakan selanjutnya peneliti melakukan *evaluation action* terhadap proses serta hasil yang didapatkan dari *pressure* terhadap *pressure target*. Adapun hasil dari evaluasi yang

dilakukan yakni adanya beberapa instruksi dari pihak Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada kepala-kepala unit pelaksana teknis untuk merespon pentingnya kebijakan penanggulangan bencana. Selanjutnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung merespon instruksi tersebut dengan melahirkan kebijakan dalam bentuk :

1. Surat pengantar permohonan kerjasama Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang penanggulangan bencana kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Jawa Barat Nomor : W11.PAS.PAS.26-PK.01.08.03-387/2015.
2. *Draft Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penanggulangan Bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung yang telah dikirim bersamaan dengan surat permohonan kerja sama. Kebijakan tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Surat Keputusan Nomor : W.11.PAS.PAS.26.UM.01.01.408 Tahun 2015 Tentang Tim Penanggulangan Bencana Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Di dalam surat keputusan tersebut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung telah menjelaskan tupoksi tugas masing-masing satuan tugas (penetapan *draft* kebijakan).

Dari hasil diatas, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi *pressure group* dalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung sangat optimal dan sangat berpengaruh dalam melakukan *pressure* terhadap Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat sehingga melahirkan beberapa kebijakan terkait penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut saat ini telah di implementasikan dan telah dievaluasi kekurangan-kekurangannya untuk perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen penanggulangan bencana dimasa yang akan datang.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa *partisipasi pressure group* dalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung dapat dilaksanakan dengan baik. Dari evaluasi yang dilakukan, diketahui bahwa kebijakan yang ada masih sangat terbatas pada manajemen keorganisasian dan tupoksi masing-masing dari anggota organisasi dalam penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung. Oleh karena itu rekomendasi yang diberikan adalah penyempurnaan kebijakan manajemen penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dalam upaya peningkatan perlindungan anak didik dan petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung.

Pengujicobaan efektifitas dan ketepatan penelitian ini memiliki prasyarat, adapun prasyarat tersebut yakni memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang sama dengan objek penelitian yang diteliti oleh peneliti. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa proses penelitian seperti ini dapat diujicobakan kepada objek yang memiliki karakteristik tidak persis sama dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini.

Untuk mendukung stabilitas dan keberlanjutan hasil penelitian, maka peneliti mengharapakan adanya dukungan dan perhatian

dari berbagai pihak. Adapun rekomendasi yang perlu disampaikan peneliti adalah :

Rekomendasi bagi peneliti lanjutan

- a. Kepada praktisi dan perguruan tinggi yang memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan tema dan tempat yang sama, maka peneliti merekomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai bagaimana penelitian berikutnya secara detail mencoba menguraikan analisis kebijakan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan maupun kebijakan-kebijakan manajemen kebencanaan lainnya yang belum ditetapkan.
- b. Ke depan diharapkan peneliti lanjutan dapat mengembangkan kebijakan manajemen penanggulangan bencana yang ada, dimana kebijakan manajemen penanggulangan bencana tidak hanya mengatur sistem organisasi kebencanaan dan tupoksi masing-masing anggota organisasi melainkan juga mengatur standar operasional prosedur (SOP) dalam penanggulangan bencana mulai dari prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Rekomendasi bagi akademisi

Untuk pengembangan pendidikan pekerja sosial khususnya bidang kajian bencana dan pengungsi, diharapkan ada pengkajian khusus tentang manajemen penanggulangan bencana bagi para narapidana, anak didik Pemasarakatan, maupun tahanan di lembaga Pemasarakatan dan rumah tahanan, sehingga ini menjadi salah satu bagian yang sangat menarik jika dapat dimasukkan kedalam topik pembelajaran mahasiswa untuk bisa dijadikan contoh dalam rangka pengembangan pengetahuan dalam manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.

Rekomendasi bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat

Kebijakan manajemen penanggulangan bencana sebaiknya menjadi salah satu perhatian khusus bagi lembaga ini. Pembentukan tim penanggulangan bencana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung perlu dukungan dan tindak lanjut oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat kebijakan yang ada. Peneliti memberikan rekomendasi kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat berupa:

- a. Percepatan pembuatan standar operasional prosedur (SOP) untuk mendukung tim penanggulangan bencana yang telah dibentuk di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung.
- b. Pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dapat sesegera mungkin menginstruksikan kepada seluruh unit pelaksana teknis mereka untuk membuat manajemen penanggulangan bencana seperti yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung.
- c. Kesiapan sumber daya manusia perlu di dukung dengan suatu kebijakan yang mengatur tentang infrastruktur bangunan lembaga pemasarakatan. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kriteria-kriteria bangunan yang baik dan tangguh terhadap bencana sehingga dapat membantu mengurangi tingkat risiko bencana bagi petugas dan anak didik pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III

Bandung maupun unit pelaksana teknis lainnya.

Rekomendasi bagi Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung

Kebijakan manajemen penanggulangan bencana yang telah ditetapkan perlu implementasi yang benar-benar baik. Hal tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana bila Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung telah mempunyai standar operasional prosedur yang mendukung kebijakan yang ada. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan kepada Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung untuk mengawal serta melobi Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat sesegera mungkin menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka menguatkan kebijakan manajemen penanggulangan bencana yang telah di tetapkan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung.

Rekomendasi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat

Adanya permohonan kerjasama yang dikirimkan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung kepada BPBD Jawa Barat yang dituangkan kedalam *draft Memorandum of Understanding (MoU)* terkait kerjasama dalam penanggulangan bencana, peneliti merekomendasikan sebaiknya pihak BPBD Jawa Barat sesegera mungkin merespon, menindaklanjuti serta menetapkan kerjasama tersebut. Hal ini merupakan salah satu wujud kesiapan dari Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dan jaringan mereka dengan melakukan kerjasama dengan BPBD Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akibande, J.A (2008). *Government Explined*. Lagos : Macak Books Ventures.
- Alonge, F. (2005). *Principles and Practice of Government*. Nigeria : University Press Plc.
- Cohen, J.M. dan Uphoff, N.T. (1977). *Rural Development Participation*. New York : Cornel University RDCCIS.

- Creswell, John W. (2003). *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA : Sage Publications.
- Fahrudin, Adi. (2015). *Advokasi Pekerjaan Sosial*. Naskah Akhir Advokasi Sosial.
- I Nyoman Sumardi. (2010). *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia.
- Johari, J.C. (2011). *Principles and Practice of Government. Nigerian and The World in Prespectives*. Nigeria : University Press Plc.
- Kaminski, L. dan Walmsley, C. (1995). *The Advocate Brief. A Guide for Social Workers. The Social Worker*, 63, 53-58.
- Kutchins, H. dan Kutchins, S. (1978). *Advocacy and Social Work*. Dalam G. Weber & G. McCall (Eds.), *Social Scientist as Advocates : View from the applied disciplines*. Beverly Hills, CA : Sage.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Suharto, Edi. (2011). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Abdul Solichin. (2012). *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.